

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia pendidikan yang semakin pesat membutuhkan kerja keras dari semua pihak untuk menyukseskan program pendidikan nasional. Tantangan akan semakin besar, dan beragam sehingga dibutuhkan lulusan dari lembaga pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dalam arti luas adalah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan ketiga aspek yakni pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup. Upaya untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa dilaksanakan dalam bentuk formal dalam sistem persekolahan atau pendidikan nonformal diluar sistem persekolahan dan informal.

Pendidikan formal memiliki tujuan dan konsep yang sistematis dan dirumuskan dalam suatu kurikulum tertentu. Aturan yang mengikat dan ketat untuk bisa melaksanakan proses tersebut. Pendidikan sistem sekolah mempunyai peran yang penting khususnya untuk kelangsungan suatu sistem politik yang ada.

Paige dalam Cholisin (2007:153) merujuk pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem politik menjadi empat tipe yaitu partipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal, dan partipasi pasif.

Partisipasi yang dikemukakan diatas tidak akan muncul dengan sendirinya dalam diri generasi muda, melainkan hasil rekayasa sosial dalam wujud pendidikan yang dikembangkan dan dipelajari dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Menurut Taniredja (2012: 57) untuk melahirkan partisipasi tersebut, maka PPKn harus memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan bermakna sehingga setiap peserta didik : (1) memiliki pengetahuan tentang sistem politik ekonomi, (2) memahami dan menyadari nilai-nilai demokrasi, (3) mampu mendiskusikan isu-isu kontroversial, (4) mampu menemukan secara personal model-model yang dapat dijadikan tladan, (5) memahami kontribusi organisasi-organisasi dalam masyarakat madani, termasuk di dalamnya kelompok-kelompok advokasi serta (6) memiliki self estifikasi yang positif dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Tanpa adanya sosialisasi di kalangan remaja atau pelajar akan terjadi gejala politik yang berkepanjangan yang merupakan pencerminan tidak adanya dukungan dari masyarakat terhadap sistem politik yang ada, yang akan membawa akibat sistem politik runtuh dan diganti. Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan sebagai wujud sosialisasi politik perlu di tingkatkan dan dikembangkan di sekolah melalui organisasi-organisasi siswa demi tercapainya tujuan untuk menyiapkan generasi muda yang berwawasan global dan memiliki pengetahuan tentang demokrasi yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2003, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Oleh karena itu negara atau pemerintah demokrasi akan menerapkan dan melaksanakan sosialisasi pendidikan demokrasi di kalangan warganya khususnya di kalangan generasi muda dan pelajar. Praktik sosialisasi pendidikan demokrasi melalui keluarga, media masa dan terutama lewat sistem sekolah. Berdasarkan hal tersebut pendidikan demokrasi di sekolah akan menjadi tujuan penelitian ini.

Berkembangnya dunia pendidikan maka telah banyak organisasi-organisasi siswa di setiap sekolah, contoh organisasi di sekolah adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Hizbul Wathan (HW), Palang Merah Remaja (PMR), Pramuka dan lainnya. Namun dalam hal ini IPM akan menjadi obyek yang akan diteliti, karena ditemukannya temuan yang menarik di dalamnya seperti halnya pelaksanaan musyawarah yang belum sepenuhnya di hadiri seluruh pengurus IPM sendiri, kemudian untuk pelaksanaan Pemilihan Umum dalam hal pemilihan Ketua dan Pergantian Pengurus yang tidak sesuai dengan konsep PEMILU yang benar. Oleh karena itu mengingat IPM menjadi salah satu wadah pengembangan pendidikan demokrasi yang diterapkan dalam berorganisasi. Dari organisasi-organisasi yang ada tersebut, IPM merupakan salah satu organisasi yang dapat melaksanakan Pendidikan Demokrasi di sekolah.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana praktik pendidikan demokrasi dalam kegiatan IPM maka penulis akan menyusun skripsi melalui penelitian dalam judul “ Implementasi Pendidikan demokrasi dalam organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pendidikan demokrasi dalam IPM SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto ?
2. Bagaimana permasalahan praktik pendidikan demokrasi pada IPM SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto ?
3. Bagaimana upaya mengatasi permasalahan praktik Pendidikan Demokrasi pada IPM SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan penelitian yaitu :

1. Mengetahui praktik pendidikan demokrasi dalam IPM SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto.
2. Mengetahui permasalahan praktik pendidikan demokrasi pada IPM SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto

3. Mengetahui upaya mengatasi permasalahan praktik pendidikan demokrasi pada IPM SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah sumbangan pemikiran ilmiah mengenai Pendidikan Demokrasi di dalam Organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah
 - b. Menjadi dasar bahan pengembangan keilmuan PPKn dalam Pendidikan Demokrasi di Organisasi IPM.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Hasil penelitian ini dijadikan masukan bagi organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto sebagai acuan dalam praktik pendidikan demokrasi
 - b. Bagi anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi acuan bagi anggota Organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah ketika menghadapi permasalahan dan terjun ke masyarakat secara langsung dengan menerapkan Pendidikan Demokrasi